BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan organisasi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Aset tetap yang dikelola dengan baik akan mendukung operasional dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Pengelolaan yang akuntabel terhadap aset tetap ini juga merupakan salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aset tetap sangat penting bagi bisnis apa pun, baik itu perusahaan atau lembaga pemerintah. Hal ini dikarenakan aset tetap berperan sebagai penyedia informasi mengenai aset suatu organisasi dan membantu dalam memperoleh laporan keuangan yang akurat, penilaian bisnis, dan analisis keuangan yang komprehensif. Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan memiliki kebijakan akuntansi untuk mencatat, menilai, dan menyajikan setiap akun, dimulai dengan aset, liabilitas, dan ekuitas (Priharto, 2021)

Aset tetap mempunyai prioritas yang cukup tinggi dalam laporan keuangan suatu instansi atau perusahaan. Aktiva tetap yang ditampilkan dalam laporan pengelolaan keuangan dalam bentuk neraca memberikan informasi tentang kekayaan dan potensi ekonomi otoritas dan perusahaan. Di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diadopsi oleh IFRS (International Financial Reporting Standards) dikenal sebagai salah satu

pedoman akuntansi keuangan. Perusahaan (organisasi) yang akuntabel publik, baik yang terdaftar di pasar modal maupun dalam proses pendaftaran di pasar modal, menggunakan PSAK sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan akuntansinya (Zsazya, 2020).

Pengelolaan aset tetap merupakan aspek krusial dalam memastikan efisiensi operasional dan transparansi dalam pemerintahan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai aset tetap, termasuk perangkat yang mendukung pelayanan publik, seperti mesin pencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, saat ini dinas mengalami masalah dalam pengelolaan aset tetap, terutama terkait dengan dua perangkat KTP yang rusak. Kerusakan ini tidak hanya menghambat proses pencetakan KTP, tetapi juga berdampak negatif pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pengadaan dan perbaikan perangkat yang rusak menjadi tantangan besar, terutama mengingat keterbatasan anggaran dan prosedur yang panjang.

Penyajian aset tetap pada instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang diimplementasikan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP No. 07 mengharuskan instansi pemerintah untuk mengklasifikasikan aset tetap menjadi beberapa kategori, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Dengan diberlakukannya PSAP No. 07, instansi pemerintah diwajibkan untuk

menyajikan nilai aset tetap secara akurat, mulai dari pengakuan, pengukuran, penghentian, hingga pelepasan dan pengungkapan aset tetap.

Tinjauan terhadap pelaksanaan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan standar ini, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Masalah utama yang dihadapi termasuk kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku serta kendala dalam pengelolaan dan perbaikan perangkat KTP yang rusak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan akuntansi aset tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, khususnya dalam konteks pengelolaan perangkat KTP yang rusak. Penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana standar akuntansi telah dilaksanakan, mengevaluasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan agar pengelolaan aset tetap dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

"Bagaimana Pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP no. 07 Tahun 2010 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal?".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP no. 07 Tahun 2010 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis memperoleh wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai perlakuan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tahun 2010 dan penerapannya di instansi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penerapan akuntansi aset dan evaluasi penerapan akuntansi aset.

3. Bagi Prodi D3 Akuntansi

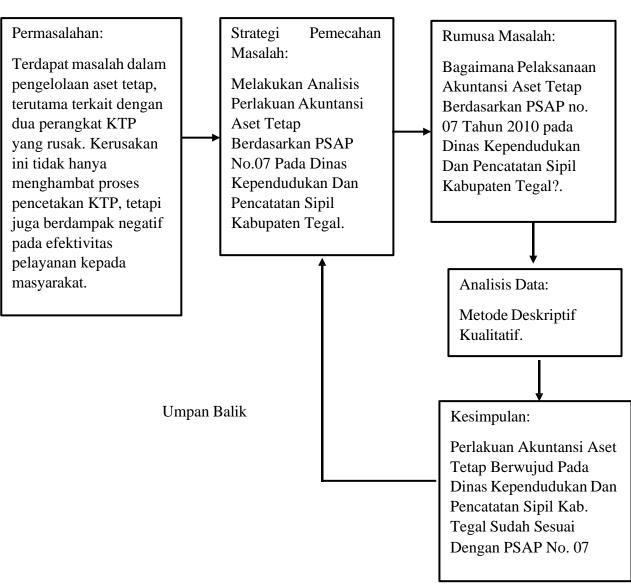
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai kemajuan akademik Politeknik Harapan Bersama dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut serta menjalin kerjasama antara akademisi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, batasan masalah pada penelitian ini difokuskan hanya menganalisis penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal periode 2020-2022. Aset tetap yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal, yaitu tanah, bangunan gedung, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan instalasi, dan aset tetap lainnya sesuai PSAP No.07 Tahun 2010.

1.6 Kerangka Berpikir

Bagi instansi pemerintah, perlakuan akuntansi aset tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PSAP No.07, sehingga instansi pemerintah dapat dengan mudah mengelola dan melaporkan aset tetap. Oleh karena itu perlu adanya kepastian mengenai kesesuaian antara akuntansi aset tetap dengan PSAP No.07. Dibawah ini kerangka berpikir mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, PSAP No.07. Berdasarkan penjelasan yang disebutkan sebelumnya penelitian ini dapat digambarkan dengan kerangka yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar. Intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori tentang pengertian, karakteristik, klasifikasi dsb sesuai judul Tugas Akhir yang diangkat. Tinjauan pustaka juga berisi tentang penjelasan konsep dan prinsip

dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian, judul sub bab yang ada dapat disesuaikan dengan topik Tugas Akhir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menerangkan tentang metodologi yang digunakan saat akan menyelesaikan masalah pada penelitian. Metode penelitian berisikan Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi lampiran-lampiran yang memuat informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan. Lampiran antara lain berisi surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari tempat penelitian, buku bimbingan, spesifikasi teknis serta data- data lain yang di perlukan.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka memuat pustaka yang dipakai dalam Tugas Akhir. Referensi yang digunakan bersumber dari buku, artikel jurnal, situs web, dan literature lain yang berkaitan dengan penelitian.

Lampiran

Berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari tempat Penelitian, Buku Bimbingan Tugas Akhir. Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Dapat juga berupa gambar, perhitungan- perhitungan, grafik atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumny